



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIZAM UL MULUK
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 463572

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	480.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/120 m2 di KAB / KOTA SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	153.000.000
1. MOBIL, HONDA HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	70.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	223.535.475
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	926.535.475
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	926.535.475

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI YULIET
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 637685

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/129 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	257.000.000
1. MOBIL, KIJANG INNOVA TOYOTA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
3. MOBIL, JAZZ GD.3 1.5 VTI A/T (CKD) HONDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.542.059
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.060.042.059
III. HUTANG	Rp.	266.476.366
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	793.565.693

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINA ADYANTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 887970

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/51 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	162.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU AYL A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	22.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.104.447
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	724.104.447
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	724.104.447

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SATRI EDI
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 880977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 765.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/129 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 201.000.000

1. MOBIL, CRV MINI BUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TAFT MINI BUS Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.566.798

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 975.566.798

III. HUTANG Rp. 15.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 960.566.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALINI PUTRIZA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 929721

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	175.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	73.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI SPALS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	22.119.580
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	305.219.580
III. HUTANG	Rp.	67.131.562
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	238.088.018

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA LASMITA SARI NASMI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 808480

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	119.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	115.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	834.300.000
III. HUTANG	Rp.	745.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	89.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : USMAN INDRA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 667590

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 110.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 154.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
3. MOTOR, SONIC 150 R MOPED Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 49.149.949

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 318.949.949

III. HUTANG Rp. 221.213.630

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 97.736.319

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUSRINALDI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 431164

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	84.000.000
1. MOTOR, HONDA ACHIM21B04 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, AYLA D Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	342.300.000

III. HUTANG **Rp.** **147.882.436**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **194.417.564**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.